

Evaluasi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih tahun 2024

Julia Azizah Marshalena¹, Asca Prita Alya², Sabrina Kansatania Wijaya³, Maria Degly Angelia⁴, Singgih Manggalou⁵

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

22041010103@student.upnjatim.ac.id

Kata Kunci:

KPU Sidoarjo,
Sosialisasi Pemilu,
Partisipasi Pemilih

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada (Pilkada) 2024. Partisipasi pemilih merupakan indikator penting bagi berjalannya demokrasi, dan upaya untuk meningkatkannya menjadi agenda utama KPU Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Meskipun KPU Sidoarjo telah melaksanakan berbagai strategi sosialisasi, seperti edukasi pemilih pemula dan penggunaan media sosial, angka partisipasi pemilih justru mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa penyebab rendahnya partisipasi antara lain minimnya kepercayaan publik terhadap kandidat, kejenuhan terhadap informasi politik, serta hambatan akses yang dialami kelompok rentan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran dan efektif di masa mendatang.

Key Word:

KPU,
Sidoarjo
Election Outreach,
Voter Participation

Abstract

This study aims to evaluate the socialization carried out by the KPU (General Election Commission) of Sidoarjo Regency in increasing voter participation in the 2024 Regional Head Election (Pilkada). Voter participation is an important indicator for the running of democracy, and efforts to improve it are the main agenda of the Sidoarjo KPU. Although the Sidoarjo KPU has implemented various socialization strategies, such as education for novice voters and the use of social media, the voter participation rate has actually decreased compared to the previous period. Some of the causes of low participation include lack of public trust in candidates, saturation of political information, and access barriers experienced by vulnerable groups. The results of this evaluation are expected to be the basis for the preparation of a more targeted and effective socialization strategy in the future.

Copyright © 2025 Julia Azizah Marshalena, Asca Prita Alya, Sabrina Kansatania Wijaya, Maria Degly Angelia, Singgih Manggalou

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi dapat dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Partisipasi tidak hanya sebatas hadir secara fisik, tetapi juga mencakup kontribusi pikiran, tenaga, bahkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum merupakan indikator penting bagi kesehatan demokrasi suatu negara. Legitimasi dalam konteks politik merupakan konsep yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan serta kewenangan para pemimpin atau institusi negara. Legitimasi bukan sekedar soal kekuatan atau kemampuan memerintah, melainkan tentang hak moral dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemimpin untuk menjalankan kekuasaan dan membuat kebijakan. Menurut Max Weber dalam Umanailo (2019), legitimasi bersumber dari tiga tipe utama, yaitu tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Legitimasi tradisional muncul karena adanya kebiasaan atau tradisi yang telah lama berlangsung, seperti kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun. Legitimasi karismatik didasarkan pada kualitas pribadi dan daya tarik luar biasa dari seorang pemimpin sehingga masyarakat bersedia mengikuti dan mempercayainya. Sementara itu, legitimasi legal-rasional muncul dari sistem hukum yang rasional dan prosedur formal yang diakui bersama, misalnya melalui pemilihan umum yang sah.

Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik serta para pemangku kebijakan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah dapat menunjukkan apatisisme atau ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik yang ada. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih

menjadi agenda utama bagi penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Kabupaten Sidoarjo dapat mengadopsi berbagai strategi yang telah diterapkan di negara lain. Salah satu pendekatan efektif dari negara Kanada adalah Elections Canada, mengembangkan program pendidikan pemilih yang menyasar berbagai kelompok usia, termasuk pemilih muda dan pemilih pemula. Program ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga interaktif, seperti simulasi pemilu di sekolah, pelatihan bagi guru, serta distribusi materi pembelajaran yang dirancang untuk membangun pemahaman mendalam mengenai proses demokrasi dan pentingnya peran suara individu dalam sistem pemerintahan.

Melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disesuaikan dengan segmentasi masyarakat. Seperti mengadakan sosialisasi sebagai upaya dalam membangun kembali kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Terjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh KPU Sidoarjo adalah keterbatasan dalam pemanfaatan sosialisasi digital. Di era modern, penggunaan media sosial dan platform digital sangat penting untuk menjangkau pemilih, terutama Gen-Z yang lebih aktif di dunia maya. KPU Sidoarjo masih mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan strategi digitalnya akibat keterbatasan sumber daya pegawai yang memiliki keahlian di bidang digital marketing serta belum adanya strategi khusus yang dirancang untuk menyasar pemilih melalui platform digital.

Penurunan partisipasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin sebelumnya. Kekecewaan terhadap kinerja pejabat yang terpilih dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan berikutnya. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah dapat menyebabkan apatisisme politik dan rendahnya partisipasi pemilih. Selain itu, jumlah pasangan calon (paslon) yang lebih sedikit juga dapat mempengaruhi antusiasme pemilih. Pilihan yang terbatas dapat membuat pemilih merasa tidak memiliki alternatif yang sesuai dengan preferensi mereka, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi. Penelitian menunjukkan bahwa kompetisi yang rendah dalam pemilihan dapat menurunkan motivasi pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka. Kejenuhan akibat banyaknya pemilihan dalam waktu yang berdekatan juga menjadi faktor penurunan partisipasi. Pemilih dapat merasa lelah dan kurang termotivasi untuk berpartisipasi jika terlalu sering dihadapkan pada proses pemilihan dalam kurun waktu yang singkat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi. Ketika individu atau kelompok sibuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka partisipasi dalam kegiatan sosial atau pemerintahan menjadi prioritas yang rendah.

Menurut Arini (2024), mengidentifikasi bahwa voter fatigue merupakan salah satu faktor signifikan yang menyebabkan penurunan partisipasi pemilih, khususnya dalam konteks pemilu yang berlangsung secara berdekatan atau melibatkan terlalu banyak tahapan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemilih yang merasa lelah secara mental akibat informasi politik yang berlebihan dan jadwal pemilu yang padat cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini paling dominan terjadi pada pemilih usia muda dan pemilih perkotaan, yang cenderung merasa jenuh dengan kampanye yang terlalu sering dan bersifat repetitif. Meskipun terdapat upaya intensif dari KPU untuk menyosialisasikan pentingnya partisipasi dalam pemilu, dampaknya tidak sepenuhnya optimal. Sebagaimana juga disinggung oleh Arini, adalah kejenuhan pemilih terhadap informasi politik yang tidak terkuras dengan baik. Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, banyak pemilih merasa bahwa sosialisasi yang dilakukan belum cukup menyentuh aspek emosional dan personal pemilih, serta kurang dalam inovasi penyampaian pesan yang dapat membangkitkan kembali minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam Pilkada tidak hanya sekedar menggunakan hak suara maupun memenuhi hak politik sebagai warga negara, akan tetapi juga berperan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Karena tingginya tingkat partisipasi pemilih mencerminkan sejauh mana kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Sayangnya dalam Pilkada 2024, partisipasi pemilih di Sidoarjo menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun KPU Sidoarjo telah menyusun dan menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama melalui sosialisasi dan edukasi politik, tetap penting untuk dievaluasi untuk mencari tahu faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan. Evaluasi ini sangat penting, agar KPU dapat menyusun strategi dan keputusan yang lebih tepat, terutama dalam menjangkau kelompok pemilih yang cenderung memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Jadi penting untuk melakukan evaluasi mendalam guna mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat keberhasilan upaya tersebut. Evaluasi ini kami lakukan dengan harapan agar KPU dapat merumuskan strategi dan keputusan yang lebih tepat dan efektif, terutama dalam menjangkau kelompok pemilih yang cenderung memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Pada pemilihan 5 tahun yang akan datang partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah dapat meningkatkan secara signifikan.

Berdasarkan penelitian Kurniawan (2023), yang berjudul "Digitalisasi: Strategi Komunikasi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z pada Pemilu 2024" menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah memanfaatkan media sosial, situs web, serta media massa untuk sosialisasi. Selain itu, program "KPU Goes to Campus" dan kerja sama dengan perguruan tinggi juga diterapkan guna meningkatkan edukasi politik dan partisipasi Gen Z dalam Pemilu 2024 (Kurniawan et al., 2023).

Pada penelitian Putri dan Muljanto (2023), dengan judul "Efektivitas Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo: Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Disabilitas" menggunakan metode kualitatif deskriptif. Studi ini menilai partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu, menemukan bahwa hanya 100 dari 5.855 penyandang disabilitas menghadiri sosialisasi, dan 18,36% menggunakan hak pilihnya. Hambatan utama meliputi keterbatasan akses dan lokasi pemilihan yang kurang ideal. Untuk meningkatkan partisipasi, KPU Sidoarjo menyediakan alat bantu Braille, pendampingan KPPS, serta layanan pengantaran surat suara (Putri & Muljanto, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Rifansyah (2024), dengan judul "Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024" menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU Jawa Timur telah berjalan efektif sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2018. Sosialisasi melalui Kirab Pemilu dan acara Nobar berhasil meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama pemilih muda, serta mendapat respons positif (Rifansyah & Anisykurlillah, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

Merujuk pada teori dari John W. Creswell (2023) yang menekankan pentingnya memahami makna subjektif yang diberikan individu terhadap pengalaman sosial mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Peneliti akan memahami secara mendalam bagaimana strategi sosialisasi tersebut disusun, dilaksanakan, serta bagaimana respon masyarakat terhadap program tersebut.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif. Pemilihan informan dilakukan secara sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu, yang meliputi pejabat KPU, tim pelaksana sosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola-pola yang menggambarkan sejauh mana kegiatan sosialisasi berjalan efektif dalam lingkungan masyarakat lokal di Kabupaten Sidoarjo

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keselarasan informasi yang diperoleh. Selanjutnya member checking atau pengecekan kembali hasil temuan kepada informan dilakukan agar pemahaman peneliti sesuai dengan makna yang sebenarnya dari informan. Penelitian ini menggunakan thick description atau deskripsi mendalam untuk menggambarkan kondisi atau situasi secara rinci sehingga pembaca dapat memahami situasi dan latar belakang penelitian dengan jelas. Dengan penerapan teknik-teknik ini penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas dalam konteks sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo merujuk pada sejauh mana kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo berlangsung selama empat bulan, yakni dari bulan Agustus hingga November 2024 dalam kurun waktu tersebut. Rangka untuk meningkatkan literasi politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi lokal, sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 diselenggarakan dengan melibatkan berbagai lembaga dari beragam latar belakang sosial. Sebanyak 25

lembaga berpartisipasi dalam kegiatan ini, mencakup institusi pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas yang berasal dari kelompok marjinal dan wilayah terpencil.

Tabel 1. Persebaran Partisipasi Lembaga Pada Pilkada Sidoarjo Tahun 2024

No.	Nama Lembaga	Jenis Lembaga
1.	Forum Masyarakat Millennial	Organisasi Kepemudaan
2.	Dewan Kesenian Sidoarjo	Organisasi Kemasyarakatan
3.	SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo	Institusi Pendidikan (SMA)
4.	Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi	Organisasi Mahasiswa / Kepemudaan
5.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sidoarjo	Organisasi Mahasiswa
6.	Delta Crisis Center (Kelompok Masyarakat Marjinal)	Komunitas Marjinal
7.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sidoarjo	Organisasi Mahasiswa
8.	SMP PGRI 9 Sidoarjo	Institusi Pendidikan (SMP)
9.	SMA Ulul Albab Sidoarjo	Institusi Pendidikan (SMA)
10.	Forum Pemuda Sidoarjo	Organisasi Kepemudaan
11.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Sidoarjo	Organisasi Kepemudaan
12.	Rumah Pancasila Sidoarjo	Organisasi Kemasyarakatan
13.	Forum Komunikasi Pencak Silat Kec. Krembung Sidoarjo	Organisasi Kemasyarakatan
14.	Pemuda Muhammadiyah Kabupaten	Organisasi Kepemudaan
15.	SMP Negeri 2 Gedangan	Institusi Pendidikan (SMP)
16.	Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Kenongo	Organisasi Keagamaan Kemasyarakatan
17.	Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Sidoarjo	Organisasi Keagamaan Perempuan
18.	PC Muslimat NU Sidoarjo	Organisasi Keagamaan Perempuan
19.	SMAN 1 Wonoayu	Institusi Pendidikan (SMA)
20.	SMA Islam Sidoarjo	Institusi Pendidikan (SMA)
21.	Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, Kec. Buduran	Komunitas Wilayah Terpencil
22.	Sosialisasi Kaum Disabilitas di Desa Lebo	Komunitas Disabilitas
23.	Desa Kalikendil, Kecamatan Porong	Komunitas Wilayah Terpencil
24.	Rumah Tahanan Medaeng	Narapidana Pria
25.	Rutan Perempuan kelas II A Surabaya	Narapidana Wanita

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Kegiatan sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu elemen penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Berbagai metode dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari sosialisasi langsung melalui pertemuan tatap muka, penyuluhan di tingkat desa, hingga pemanfaatan media sosial dan media cetak untuk mewujudkan sosialisasi yang merata dan efektif, KPU Sidoarjo membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Jumlah peserta dalam setiap sesi dibatasi maksimal 100 orang guna menjaga efektivitas komunikasi dan intensitas diskusi. Pendekatan kolaboratif dan multisektoral ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip partisipasi demokratis yang merata dan berkeadilan, serta menjadi model pelibatan masyarakat yang relevan untuk pengembangan tata kelola pemilu di tingkat daerah.

Efisiensi dalam konteks evaluasi merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi dapat menghasilkan output maksimal dengan menggunakan input seminimal mungkin. Dalam studi ini, efisiensi diukur melalui rasio antara input berupa sumber daya (anggaran, tenaga kerja, waktu, dan media sosialisasi) yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo dengan output berupa tingkat partisipasi pemilih yang berhasil dicapai dalam Pilkada Serentak 2024.



Gambar 1. Partisipasi Pilkada di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Sidoarjo, terjadi penurunan angka partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pilkada 2020. Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilih hanya mencapai 70% dari total 1.479.539 pemilih terdaftar, menurun dari 71,07% pada tahun 2020 (Fahmi, 2024). Melihat penurunan angka partisipasi masyarakat Sidoarjo, KPU Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan pemilih dalam Pilkada 2024. Penurunan partisipasi dengan input yang sama atau meningkat menunjukkan menurunnya efisiensi program sosialisasi pemilu. Sumber daya yang telah dikeluarkan tidak menghasilkan output yang sebanding. Hal ini menandakan bahwa strategi sosialisasi yang dilakukan kurang tepat sasaran atau tidak mampu mengatasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya efisiensi: 1) Strategi Sosialisasi yang Kurang Efektif, Meskipun intensitas kampanye digital meningkat keterjangkauan informasi masih terbatas di kalangan pemilih pedesaan atau lansia yang kurang akrab dengan teknologi; 2) Rendahnya Kepercayaan Publik, Tingkat kepercayaan terhadap calon kepala daerah dan proses politik berpengaruh langsung terhadap partisipasi. Ketidakpercayaan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sosialisasi teknis, melainkan butuh pendekatan partisipatif; 3) Kurangnya Segmentasi Sosialisasi. Strategi sosialisasi cenderung bersifat umum dan belum memperhatikan karakteristik seperti pemilih muda, pemula, atau pemilih perempuan.

Dengan memperhatikan ketidak seimbangan antara input dan output tersebut, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, terutama dalam merancang ulang pendekatan sosialisasi yang lebih berbasis data dan berbasis komunitas. Ke depan, peningkatan efisiensi hanya dapat dicapai jika sumber daya dialokasikan secara strategis dan disesuaikan dengan interaksi perilaku pemilih di lapangan (KPU Sidoarjo, 2024).

Kegiatan pada sosialisasi, KPU Sidoarjo menjelaskan mengenai mekanisme pemilu, prosedur pencoblosan serta persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan hak pilih. Beberapa sosialisasi Pilkada 2024 dilakukan dengan menggunakan metode komunikasi langsung dengan peserta sehingga mampu menciptakan suasana sosialisasi Pilkada yang lebih interaktif. KPU Sidoarjo juga berupaya untuk menjangkau pemilih pemula / Gen-Z dengan menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) film yang bertemakan pesta demokrasi yang dilakukan di SMA/SMK baik negeri maupun swasta, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi dan komunitas pemuda lainnya (KAB-SIDOARJO, 2024).

Alasan KPU Sidoarjo mengadakan kegiatan Nonton Bareng (Nobar) adalah karena Gen-Z merupakan kelompok yang berpotensi memiliki tingkat partisipasi rendah dalam Pilkada, sehingga KPU Sidoarjo ingin mencapai target tingkat partisipasi publik sebanyak 85% di Pilkada 2024.

Tabel 2. Klasifikasi Usia DPT Pilkada Sidoarjo Tahun 2024

Kategori Usia	Rentang Usia	Jumlah Pemilih	Presentase
Gen-Z	17-27 Tahun	341.000	23,05%
Millennial	28-43 Tahun	473.398	32,00%
Gen X	44-59 Tahun	452.585	30,59%

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Berdasarkan data DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada 2024, kelompok Gen-Z memiliki jumlah pemilih terendah apabila dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, yaitu sebanyak 341.000 orang atau 23,05% dari total pemilih. Rendahnya jumlah pemilih dari kelompok Gen-Z dapat menjadi tantangan tersendiri, mengingat Gen-Z adalah generasi yang memiliki potensi besar dalam menentukan masa depan suatu negara. Jika pemerintah dan juga Komisi Pemilihan Umum tidak secara melakukan evaluasi dan juga menemukan strategi yang cocok untuk meningkatkan partisipasi pemilih maka dapat dipastikan di pemilihan kepala daerah 5 tahun mendatang partisipasi nya tidak akan mengalami peningkatan atau mungkin justru mengalami penurunan.

Menurut Cohen dan Uphoff (1980), terdapat 4 (empat) dimensi partisipasi. Pemberian insentif oleh KPU Sidoarjo kepada masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi merupakan bentuk partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*). Cohen dan Uphoff (1980) menekankan bahwa masyarakat harus memperoleh hasil nyata dan manfaat langsung dalam keterlibatannya. Bentuk manfaat yang dimaksud oleh Cohen dan Uphoff (1980) terbagi menjadi tiga kategori yaitu *material benefits*, *social benefits*, dan *personal benefits*. Mengikuti sosialisasi pemilu, masyarakat sidoarjo telah mendapatkan 3 (tiga) manfaat tersebut. Pemberian insentif berupa uang tunai sebesar Rp100.000 merupakan bentuk *material benefit* karena fungsinya sebagai kompensasi atau pengganti biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk transportasi, kehilangan penghasilan harian, serta waktu dan tenaga yang telah diluangkan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi. Selain pemberian insentif, masyarakat juga mendapatkan makan siang yang juga termasuk dalam *material benefit*, dan juga *social benefit* karena masyarakat dapat membangun interaksi yang membangun rasa

kebersamaan. Selain itu masyarakat juga memperoleh personal benefit berupa penambahan ilmu dan wawasan terkait kepemiluan, termasuk pemahaman mengenai visi dan misi dari seluruh paslon yang akan bertarung dalam pemilu. Pengetahuan ini memberikan bekal penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan secara lebih rasional dan bertanggung jawab.

Meningkatkan partisipasi masyarakat, *participation in benefits* merupakan usaha yang sangat strategis untuk mengupayakan hal tersebut. Cohen dan Uphoff (1980) juga mengingatkan bahwa cara ini dapat meningkatkan resiko bahwa pelaksana program akan mengabaikan pentingnya partisipasi dalam aspek lain yang lebih penting dan substantif seperti pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Ini artinya partisipasi harus bersifat menyeluruh dan tidak hanya berhenti pada penerimaan manfaat saja. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Sidoarjo, masyarakat memang menerima manfaat insentif berupa uang transport dan makan siang namun pemberian insentif ini tidak bersifat transaksional dan tidak disertai dengan unsur paksaan. Meskipun demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak berhenti begitu saja karena sosialisasi hanyalah langkah awal untuk partisipasi yang lebih luas. Partisipasi masyarakat yang sesungguhnya adalah dalam menggunakan hak pilih pada pemilu. Insentif yang diberikan pada masyarakat seharusnya dipahami sebagai upaya KPU dalam mendorong partisipasi keberlanjutan yang fokus pada keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dengan cerdas.

Di sinilah pentingnya mengaitkan pendekatan partisipatif ini dengan evaluasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh William N. Dunn (2003), bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pemberian insentif oleh KPU Sidoarjo perlu dievaluasi tidak hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai strategi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya melihat apakah masyarakat datang ke sosialisasi, tetapi juga apakah mereka pulang dengan pemahaman yang lebih baik, semangat untuk memilih, dan mungkin juga keberanian untuk terlibat lebih dalam dalam proses demokrasi.

Pemerataan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi sosialisasi pilkada. Aspek ini mencerminkan sejauh mana seluruh elemen masyarakat mendapatkan akses informasi dan pemahaman yang setara mengenai proses demokrasi yang sedang berlangsung. Tanpa pemerataan, partisipasi publik bisa timpang dan cenderung mengabaikan kelompok-kelompok tertentu. Sosialisasi pilkada seharusnya tidak hanya menyasar masyarakat perkotaan atau kelompok tertentu yang mudah dijangkau media informasi. Setiap lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah terpencil, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat adat, berhak mendapatkan informasi yang sama. Pelibatan semua pihak dalam proses demokrasi akan memperkuat legitimasi hasil pilkada. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah yang telah berupaya melaksanakan sosialisasi pilkada secara menyeluruh. Berbagai media digunakan untuk menyampaikan informasi, mulai dari media sosial, siaran radio lokal, hingga pertemuan tatap muka di tingkat desa. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk menjangkau sebanyak mungkin warga tanpa memandang latar belakang sosial atau geografis. Masyarakat Sidoarjo tampak merespons dengan antusias terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Antusiasme ini terlihat dari banyaknya warga yang ikut berpartisipasi dalam forum diskusi publik maupun penyuluhan tentang pilkada. Keaktifan warga menjadi bukti bahwa informasi yang disampaikan telah diterima dengan baik dan dipahami secara merata.

Tabel 3. Data Partisipasi Pilkada Per Kecamatan Sidoarjo Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih
1	Tarik	40.064
2	Prambon	45.609
3	Krembung	41.435
4	Porong	35.747
5	Jabon	31.416
6	Tanggulangin	48.921
7	Candi	82.220
8	Sidoarjo	92.792
9	Tulangan	56.438
10	Wonoayu	48.783
11	Krian	64.205
12	Balongsendo	42.079
13	Taman	98.539
14	Sukodono	63.986
15	Buduran	50.214

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024

Distribusi informasi yang adil juga meminimalkan potensi kesenjangan pemahaman antarkelompok masyarakat. Ketika semua segmen memiliki akses yang sama terhadap informasi, keputusan politik yang diambil cenderung lebih sadar dan bertanggung jawab. Upaya ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Penyebaran informasi tidak hanya dilakukan melalui pendekatan lisan atau tatap muka. Pihak KPU juga memanfaatkan media visual berupa banner sebagai sarana sosialisasi tambahan. Banner tersebut memuat ajakan untuk tidak golput serta infografis mengenai pasangan calon yang akan dipilih dalam pilkada. Berikut terdapat lampiran mengenai pemasangan banner di salah satu desa wilayah Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 2. Pemasangan Banner Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. *Sumber : Dokumentasi KPU Sidoarjo, 2024*

Materi visual ini dirancang agar mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan. Total sebanyak 346 desa menjadi sasaran penyebaran banner dengan skema distribusi empat banner untuk setiap desa. Strategi ini ditujukan agar informasi dapat terlihat secara luas di titik-titik strategis dalam desa. Harapannya, keberadaan banner ini mampu meningkatkan kesadaran warga meskipun tingkat partisipasi belum maksimal.

Responsivitas menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sidoarjo. Masyarakat membutuhkan lembaga penyelenggara pemilu yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap pertanyaan maupun kendala yang muncul. Dalam konteks ini, KPU Sidoarjo menunjukkan peran aktif dalam menyerap aspirasi dan memberikan solusi yang dibutuhkan oleh publik. Pendekatan ini menumbuhkan kepercayaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sidoarjo tidak bersifat satu arah. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, dan aspirasi secara langsung.

Kehadiran petugas yang ramah dan sigap dalam memberikan informasi mencerminkan sikap profesionalisme lembaga tersebut. Melalui kegiatan-kegiatan tatap muka, penyebaran materi digital, hingga pemanfaatan media sosial, KPU menjangkau berbagai segmen masyarakat dengan cara yang adaptif. Pelayanan cepat terhadap kendala teknis maupun pertanyaan yang muncul selama proses sosialisasi juga merupakan bukti responsivitas yang dilakukan oleh KPU Sidoarjo. Petugas KPU tidak hanya menyampaikan informasi standar, tetapi juga bersedia menjelaskan secara rinci sesuai dengan kebutuhan warga. Hal-hal yang dijelaskan antara lain adalah; cara melakukan pencoblosan bagi warga biasa dan warga disabilitas serta yang tak kalah penting adalah infografis mengenai paslon yang akan dipilih sebagai bupati kabupaten Sidoarjo.

Ketepatan mengukur sejauh mana strategi sosialisasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial-politik lokal menjadi aspek yang penting dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi Pilkada 2024. Ketepatan ini tidak hanya menentukan seberapa jauh pesan dari sosialisasi tersebut telah tersampaikan, namun juga berpengaruh langsung terhadap keberhasilan peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 di Sidoarjo.

Masyarakat Sidoarjo memiliki karakteristik yang cukup kompleks, terdiri dari kelompok masyarakat urban dan rural, serta mencakup masyarakat dari berbagai segmen sosial seperti pemilih pemula, kelompok disabilitas, komunitas marjinal, hingga kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses informasi. Kondisi ini menuntut adanya strategi sosialisasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses informasi politik. Pendekatan yang adaptif agar semua lapisan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses demokrasi ini.

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, KPU menggunakan berbagai strategi sosialisasi mulai dari kegiatan tatap muka, sosialisasi atau penyuluhan langsung, pemanfaatan media cetak dan media luar ruang seperti baliho dan spanduk, hingga pemanfaatan sosial media untuk menjangkau pemilih muda (Gen-Z).

Sosialisasi oleh KPU Sidoarjo juga dilaksanakan di wilayah-wilayah yang tergolong tertinggal secara informasi seperti Dusun Kepetingan Desa Sawohan dan Dusun Kali Kendil Desa Plumbon Kecamatan Porong. Hal ini menjadi indikator bahwa strategi sosialisasi tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan konteks sosial dan karakteristik masyarakat, serta menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh KPU Sidoarjo menjawab keragaman kebutuhan masyarakat (KPU Sidoarjo, 2024).

Penyesuaian strategi ini juga dapat terlihat dari media yang dipilih oleh KPU Sidoarjo untuk mendukung dan membangun kedekatan dengan pemilih muda yang lebih aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Youtube. Sementara untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi, pendekatan dengan cara tatap muka dan penyuluhan secara langsung dengan sosialisasi masih tetap diandalkan. Kesesuaian antara strategi dan kebutuhan ini tampak dari antusiasme serta tingkat partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi yang jumlahnya mencapai 24 kali mulai dari bulan Agustus sampai November. Walaupun hasil akhirnya masih harus di evaluasi lebih lanjut melalui partisipasi nyata dalam penggunaan hak suara masyarakat di Pilkada 2024, namun dari sisi implementasi, strategi yang diterapkan KPU Sidoarjo telah menunjukkan kesesuaian yang cukup baik terhadap kondisi sosial dan politik Sidoarjo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 telah dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai strategi, baik konvensional maupun digital. Sosialisasi tersebut menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk kelompok marginal, disabilitas, pemilih pemula, hingga warga di daerah terpencil. Meskipun begitu, tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, menunjukkan bahwa strategi yang digunakan belum sepenuhnya efektif dan efisien. Beberapa faktor seperti kelelahan pemilih (*voter fatigue*), rendahnya kepercayaan publik, dan kurangnya segmentasi dalam penyampaian pesan menjadi tantangan utama. Disarankan agar KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan sosialisasi yang selama ini digunakan, serta mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan berbasis data. Penguatan kapasitas digital, peningkatan komunikasi dua arah, dan keterlibatan lebih dalam komunitas lokal perlu dioptimalkan agar pesan sosialisasi benar-benar menjangkau dan menggugah kesadaran pemilih. Ke depan, partisipasi masyarakat tidak hanya ditingkatkan melalui pemberian manfaat langsung, tetapi juga melalui pendekatan partisipatif yang mendorong kesadaran dan keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Dengan langkah tersebut, diharapkan partisipasi pemilih pada pemilihan berikutnya dapat meningkat secara signifikan.

DAFTAR REFERENSI

- Cohen, J., & Uphoff, N. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*.
- David Creswell, J. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (Sixth Edition). SAGE Publications India Pvt. Ltd.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (M. Darwin, Ed.; S. Wibawa, D. Asitadani, A. H. Hadna, & E. A. Purwanto, Trans.). Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, J. (2024, 12 02). Retrieved from <https://rri.co.id/pilkada-2024/1162959/partisipasi-pemilih-di-pilkada-sidoarjo-menurun>
- KPU Sidoarjo. (2024, October 31). Penuh Keseruan! KPU Sidoarjo Gelar Nobar Film "Tepatilah Janji" Tingkatkan Kesadaran Pemilih Gen-Z
- KPU Sidoarjo. (2024, December 4). *PILKADA 2024: Tingkat Partisipasi Masyarakat Sidoarjo Capai 70 Persen*. KPU KAB Sidoarjo Kab-Sidoarjo.Kpu.Go.Id.
- KPU Sidoarjo. (2024, November 14). Lanjutan Sosialisasi Pilkada 2024: KPU Sidoarjo 'Road Show' Dusun Terpencil. KPU KAB Sidoarjo Kab-Sidoarjo.Kpu.Go.Id.
- Kurniawan, M. R., Erawati, D., Setiawan, H., & Harmain, H. (2023). Digitalisasi: strategi komunikasi KPU dalam meningkatkan partisipasi gen z pada pemilu 2024. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1375–1390. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6206>
- Putri, A. J., & Muljanto, M. A. (2025). *Efektivitas Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo : Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Disabilitas*. 1, 1–9.
- Rifansyah, M. R., & Anisykurlillah, R. (2024). Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Jawa Timur Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 4(1), 32–39. <https://doi.org/10.37090/jpap.v4i1.1218>
- Umanailo, M. C. B. (2019). *MAX WEBER*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ep7bn>.